

Katalog BPS :3205008.76

STATISTIK

Kemiskinan

Sulawesi Barat

2013



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**STATISTIK KEMISKINAN
SULAWESI BARAT
2013**



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Statistik Kemiskinan
Sulawesi Barat
2013**

Nomor Publikasi : 76520.1401
Katalog BPS : 3205008.76
Ukuran Buku : 17 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : ix + 44 Halaman
Naskah : Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Gambar kulit : Bidang Integrasi Pengolahan Dan Diseminasi Statistik
Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat
Dicetak oleh :

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Topik kemiskinan tidak pernah berhenti menjadi bahan perbincangan. Berbagai telaah ataupun ulasan dimensi kemiskinan akan lebih memperkaya informasi mengenai karakteristik kemiskinan itu sendiri. Upaya tersebut juga ditempuh oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan menerbitkan publikasi Statistik Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013. Publikasi ini akan memberikan gambaran kemiskinan dan karakteristiknya. Publikasi ini setiap tahun–rutin diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat.

Publikasi ini akan memaparkan perkembangan tingkat kemiskinan, perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten dan perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi. Bahasan lainnya juga dipaparkan pada publikasi ini yaitu perspektif rumah tangga miskin di Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi karakteristik sosial baik dari segi pendidikan, ketenagakerjaan dan tempat tinggal (perumahan).

Penerbitan publikasi ini juga merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen data khususnya pemerhati kemiskinan. Kami menyadari dalam penerbitan publikasi ini tidak menutup kemungkinan adanya ketidak sempurnaan.. Oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi berikutnya.

Mamuju, Agustus 2014

Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat



SETIANTO, SE, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	2
1.3. Sumber Data.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
1.5. Konsep dan Definisi.....	3
1.6. Metode Penghitungan Kemiskinan.....	5
BAB II PERSPEKTIF KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009-2013	9
2.1. Garis Kemiskinan	9
2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	10
2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	12
2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan	14

BAB III	PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008-2012.....	16
	3.1. Garis Kemiskinan	16
	3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	17
	3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	19
	3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan	20
BAB IV	PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI DI PULAU SULAWESI TAHUN 2009-2013.....	22
	4.1. Garis Kemiskinan	22
	4.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	23
	4.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	25
	4.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan	26
BAB V	PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013.....	28
	5.1. Karakteristik Sosial Demografi.....	28
	5.2. Karakteristik Pendidikan.....	30
	5.3. Karakteristik Ketenagakerjaan.....	32
	5.4. Karakteristik Perumahan (Tempat Tinggal).....	35

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Komponennya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009-2013.....	10
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009-2013.....	12
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009-2013.....	13
4	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009-2013.....	14
5	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012.....	16
6	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012.....	17
7	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012.....	18
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012.....	19
9	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012.....	20
10	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2009-2013.....	22
11	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2009-2013.....	23
12	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2009-2013.....	25
13	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2009-2013.....	25

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
14	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2009-2013.....	27
15	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	29
16	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	30
17	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	31
18	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga Tahun 2013.....	32
19	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Penghasilan Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	33
20	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	34
21	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Luas Lantai Per Kapita (m ²) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	35
22	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	36
23	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	37

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
24	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	38
25	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	39
26	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	41
27	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Penggunaan Fasilitas Jamban di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	42
28	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013.....	44

DAFTAR GRAFIK

No Grafik	Judul Grafik	Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2009-2013.....	9
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2009-2013.....	11
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2009-2013.....	14
4	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah Tahun 2009-2013.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan banyak diperbincangan oleh berbagai kalangan termasuk politisi, budayawan, LSM, akademisi maupun praktisi bidang keilmuan lainnya. Upaya penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan diantaranya adalah ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang tepat akan menjadi landasan bagi keterarahan program pengentasan kemiskinan termasuk kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan dari berbagai dimensi termasuk diantaranya membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. ~~dimana~~ Perbedaannya tersebut terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya

(garis kemiskinan non makanan).

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data dan jumlah persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal itu bisa terwujud karena BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup analisis perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat pada kondisi 2009-2013, perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009-2013 dan perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2009-2013. Selain itu, disajikan pula profil rumah tangga miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 yang dipisahkan antara daerah perkotaan dan perdesaan ditinjau dari karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan dan tempat tinggal (perumahan).

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian publikasi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

1. Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang, ruang lingkup, sumber data, sistematika penulisan, konsep dan definisi serta metode penghitungan kemiskinan.
2. Bab II. Perspektif kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009-2013 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
3. Bab III. Perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008-2012 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
4. Bab IV. Perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2009-2013 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
5. Bab V. Profil rumah tangga miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 berisi karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan tempat tinggal (perumahan).

1.5. Konsep Dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsep Kemiskinan BPS
 - Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)
 - “ Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”

2. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
3. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
4. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
5. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan
6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

7. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

1.6. Metode Penghitungan Kemiskinan

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

p = Provinsi ke-p

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

Dimana :

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

p = Provinsi ke-p

Teknik penghitungan GKNM

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.
- Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

Dimana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004) dan daerah j (kota/desa)

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

p = Provinsi (perkotaan atau pedesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan :

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

Dimana :

$\%PM_p$ = % penduduk miskin di provinsi p

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p

BAB II

PERSPEKTIF KEMISKINAN

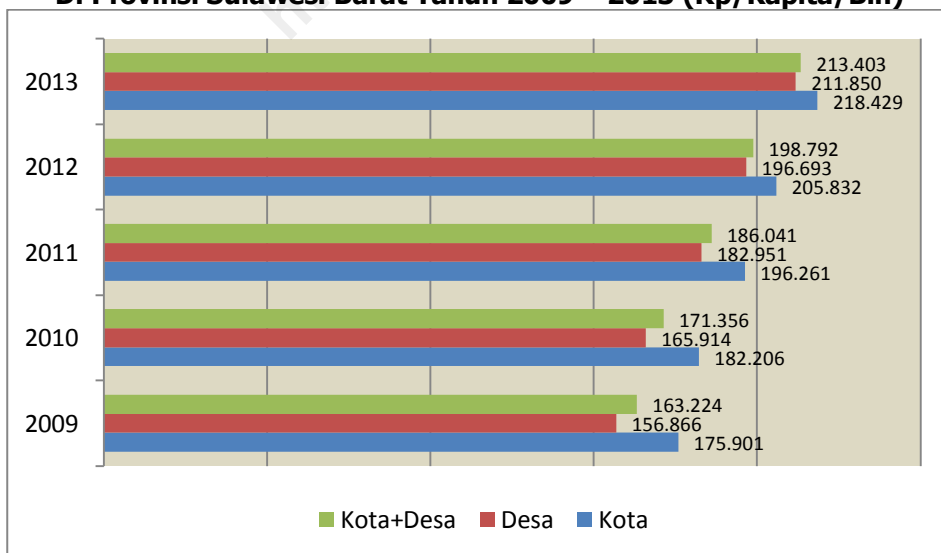
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 – 2013

Perkembangan kemiskinan dapat diketahui dari berbagai segi termasuk pendekatan tren tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2009-2013. Paparan kemiskinan ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2009-2013 menunjukkan pola yang sama baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Garis kemiskinan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Rp. 163.224,- per kapita per bulan pada tahun 2009 naik menjadi Rp. 213.403,- per kapita per bulan pada tahun 2013. Dari Gambar 1 terlihat bahwa garis kemiskinan di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di daerah perdesaan.

Gambar 1
Garis Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2013 (Rp/Kapita/Bln)



Apabila dilihat dari komponen pembentuk Garis Kemiskinan (makanan dan non makanan), Garis Kemiskinan Makanan memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 80 persen, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan hanya memberikan kontribusi sekitar 20 persen.

Tabel 1
Garis Kemiskinan Menurut Komponennya
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2013
(Rp/Kapita/Bulan)

Tahun	Makanan (GKM)		Non Makanan (GKNM)		Jumlah (GK)
	Nilai	%	Nilai	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2009	133.679	81,90	29.545	18,10	163.224
2010	140.521	82,01	30.835	17,99	171.356
2011	149.894	80,57	36.147	19,43	186.041
2012	160.845	80,91	37.948	19,09	198.792
2013	171.800	80,50	41.603	19,50	213.403

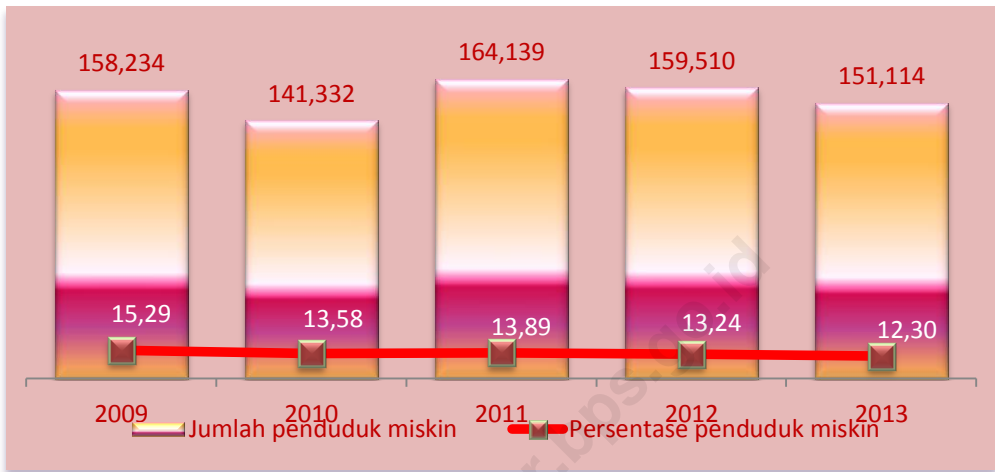
Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2009 – 2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 – 2010 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 158.234 jiwa (15,29 persen) pada tahun 2009 menjadi 141.332 jiwa (13,58 persen) pada tahun 2010. Akan tetapi, pada tahun 2011 jumlah dan persentase penduduk miskin meningkat menjadi 164.139 jiwa (13,89 persen). Selanjutnya pada tahun 2012 – 2013, jumlah

dan persentase penduduk miskin mengalami penurunan.

Gambar 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2013



Jika dilihat dari persentase penduduk miskin, selama tahun 2009-2013 di daerah perdesaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami fluktuasi (Tabel 2). Akan tetapi, secara absolut jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan mengalami fluktuatif.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2013 di daerah perkotaan sebesar 26.633 jiwa (9,18 persen) dan daerah perdesaan sebesar 124.481 jiwa (13,26 persen). Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak bila dibandingkan daerah perkotaan atau mencapai 82 persen dari total penduduk miskin.

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin		Persentase Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	Kota	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	43.512	114.722	12,59	16,65
2010	33.726	107.606	9,70	15,52
2011	29.547	134.592	10,77	14,83
2012	28.015	131.496	10,12	14,17
2013	26.633	124.481	9,18	13,26

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Secara umum, angka indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009-2013 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 0,92 poin dari tahun 2009. Akan tetapi, pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 0,77 poin. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan.

Tabel 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2013

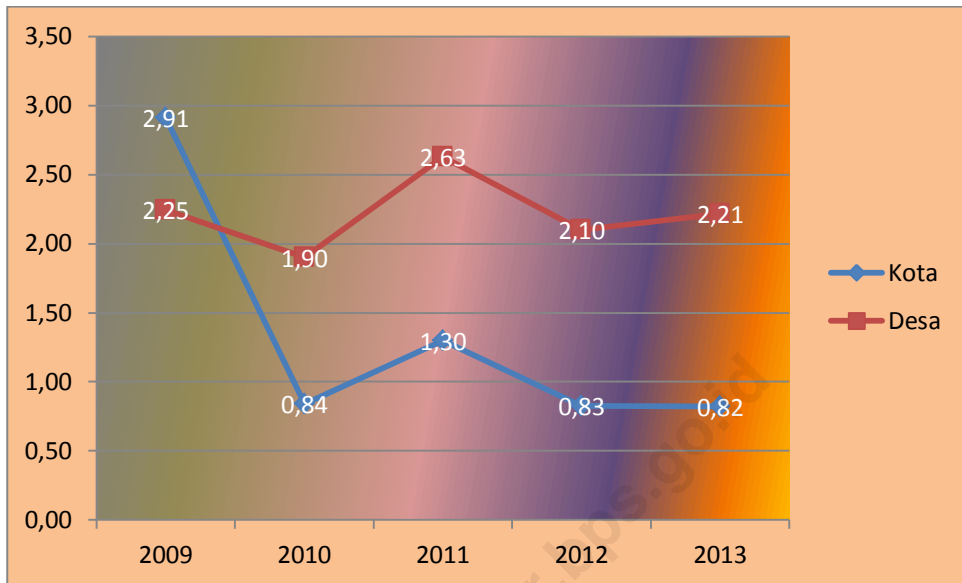
Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	2,91	2,25	2,47
2010	0,84	1,90	1,55
2011	1,30	2,63	2,32
2012	0,83	2,10	1,81
2013	0,82	2,21	1,89

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

Selain memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi, angka indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan juga lebih tinggi bila dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih tinggi di daerah perdesaan daripada daerah perkotaan.

Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, selama tahun 2009 - 2013 angka indeks kedalaman kemiskinan berfluktuasi. Meskipun demikian, angka indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan cenderung menurun, sedangkan di daerah perdesaan menunjukkan kenaikan.

Gambar 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2013



2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Tabel 4
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2013

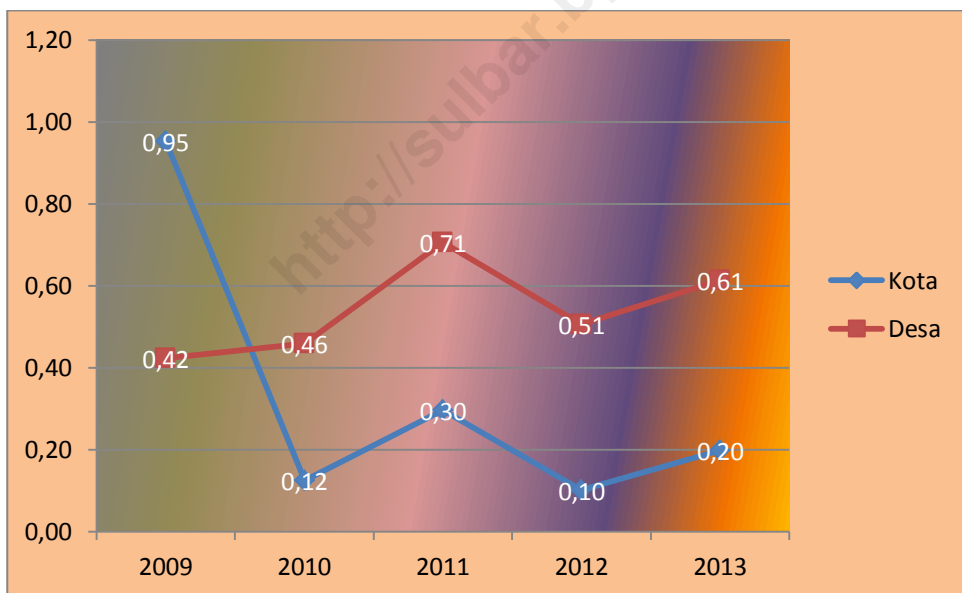
Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	0,95	0,42	0,60
2010	0,12	0,46	0,35
2011	0,30	0,71	0,61
2012	0,10	0,51	0,41
2013	0,20	0,61	0,52

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

Pada kurun waktu 2009-2013 terlihat bahwa tingkat keparahan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,08 poin yaitu dari 0,60 pada tahun 2009 menjadi 0,52 pada tahun 2013. Meskipun demikian, jika dilihat tren dari tahun ke tahun tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuasi.

Jika dibandingkan menurut wilayah, pada tahun 2009 tingkat keparahan kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Akan tetapi, pada tahun 2010-2013 tingkat keparahan kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perdesaan lebih timpang dibandingkan dengan distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan.

Gambar 4
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 – 2013



BAB III

PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008 – 2012

Kemiskinan dapat juga ditinjau secara spasial. Keterbandingan antar wilayah ini akan sangat membantu dalam intervensi program agar sesuai dengan kebutuhan setempat/lokal. Keterbandingan kemiskinan tersebut dapat dilihat diantaranya dari jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan dan kedalaman kemiskinan.

3.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2008 – 2012. Peningkatan terbesar garis kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012) terjadi di Kabupaten Majene yaitu sebesar Rp. 77.153,- per kapita per bulan atau 48,61 persen.

Tabel 5
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 – 2012
(Rp/kapita/bulan)

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	158.716	204.699	220.059	227.827	235.869
Polewali Mandar	179.438	213.942	229.996	238.104	246.498
Mamasa	149.221	158.068	169.929	175.919	182.120
Mamuju	137.055	147.699	158.782	165.733	172.988
Mamuju Utara	170.212	197.015	211.799	222.649	234.055

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2008-2012

Bila dibandingkan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat terlihat bahwa pada tahun 2008 – 2012 garis kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Mamuju.

3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin pada lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2008-2012 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2008-2009 Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara mengalami kenaikan, sedangkan kabupaten lain mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2009-2010 semua kabupaten di Sulawesi Barat mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Penurunan jumlah penduduk miskin pada semua kabupaten terjadi pada tahun 2011 dan 2012.

Tabel 6
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 – 2012
(ribu jiwa)

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	24,4	23,9	27,8	26,6	26,2
Polewali Mandar	78,3	76,6	84,3	80,4	79,1
Mamasa	22,5	22,3	22,8	21,7	21,3
Mamuju	24,7	25,4	27,7	26,4	26,0
Mamuju Utara	7,0	7,1	8,4	8,0	7,9

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2008-2012

Berbeda dengan jumlah penduduk miskin, selama periode 2008-2010 Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa dan Mamuju Utara menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun. Namun, pada periode tersebut Kabupaten Majene dan Mamuju berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008-2009 persentase penduduk miskin di Kabupaten Majene mengalami penurunan, lalu pada tahun 2009-2010 mengalami kenaikan. Sedangkan Kabupaten Mamuju pada tahun 2008-2010 terus mengalami kenaikan persentase penduduk miskin. Seperti halnya jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin mengalami penurunan di semua kabupaten terjadi pada tahun 2011 dan 2012.

Tabel 7
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 – 2012

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	18,44	18,09	18,42	17,06	16,52
Polewali Mandar	21,80	21,37	21,24	19,66	19,1
Mamasa	18,06	17,87	16,25	15,04	14,38
Mamuju	8,11	8,13	8,17	7,59	7,12
Mamuju Utara	6,52	6,47	6,20	5,77	5,3

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2008-2012

Dari lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara memiliki persentase penduduk miskin terendah bila dibandingkan tiga kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Selama periode 2008-2012 persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara tidak lebih dari 10 persen bahkan pada tahun 2012 persentase penduduk miskin di Kabupaten Mamuju

Utara mencapai 5,3 persen. Adapun tiga kabupaten lain selalu berada di atas 14 persen dimana pada tahun 2008 Kabupaten Polewali Mandar memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 21,80 persen.

3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Seiring dengan persentase penduduk miskin yang rendah di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara, tingkat kedalaman kemiskinan di kedua kabupaten tersebut juga lebih rendah bila dibandingkan tiga kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara relatif lebih dekat bila dibandingkan dengan Kabupaten Majene, Polewali Mandar dan Mamasa.

Tabel 8
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 – 2012

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	3,38	2,74	2,77	2,44	2,43
Polewali Mandar	4,84	3,51	2,81	2,97	2,67
Mamasa	4,48	2,73	2,22	1,93	2,02
Mamuju	2,14	0,99	2,15	1,07	0,97
Mamuju Utara	1,27	0,79	0,91	1,10	0,67

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2008-2012

Indeks kedalaman kemiskinan selama tahun 2008-2012 di semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan fluktuatif dari tahun ke tahun. Meskipun demikian secara umum selama lima tahun terakhir, semua kabupaten memperlihatkan penurunan angka indeks kedalaman kemiskinan dan penurunan tertinggi di Kabupaten Mamasa dari 4,48 di tahun 2008 menjadi 2,02 pada tahun 2012.

3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Sejalan dengan tingkat kedalaman kemiskinan di semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, tingkat keparahan kemiskinan pun menunjukkan angka yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Selama tahun 2008 – 2012, secara umum semua kabupaten mengalami penurunan indeks keparahan kemiskinan. Seperti halnya indeks kedalaman kemiskinan, kabupaten yang mengalami penurunan yang tertinggi adalah Kabupaten Mamasa dari 1,42 di tahun 2008 menjadi 0,44 pada tahun 2012.

Tabel 9
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 – 2012

Kabupaten	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	0,95	0,66	0,68	0,64	0,51
Polewali Mandar	1,23	0,92	0,58	0,71	0,57
Mamasa	1,42	0,70	0,50	0,37	0,44
Mamuju	0,64	0,22	0,84	0,24	0,25
Mamuju Utara	0,29	0,15	0,22	0,35	0,14

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2008-2012

Kabupaten Mamuju Utara memiliki indeks keparahan kemiskinan yang paling rendah dibandingkan kabupaten lain, meskipun pada tahun 2011 angka indeksinya sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mamuju. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Utara memiliki ketimpangan yang lebih rendah dibandingkan ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin di kabupaten lain. Angka indeks keparahan kemiskinan perlu juga diperhatikan oleh pemerintah daerah karena dalam pengentasan kemiskinan bukan hanya mengurangi jumlah penduduk miskin semata akan tetapi kualitas perbaikan kemiskinan itu sendiri perlu juga menjadi titik perhatian.

<http://sulbar.bps.go.id>

BAB IV
PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI
DI PULAU SULAWESI TAHUN 2009 – 2013

Pulau Sulawesi terbagi menjadi enam provinsi. Upaya setiap provinsi untuk menanggulangi kemiskinan akan menerapkan strategi yang berbeda sesuai dengan karakteristik kemiskinannya. Hasil intervensi program tersebut akan tergambar pada perkembangan kemiskinan di setiap provinsinya bagi dari garis kemiskinan, penduduk miskin dan ukuran kemiskinan lainnya.

4.1. Garis Kemiskinan

Tabel 10
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2009 – 2013
(Rp/kapita/bulan)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	184.772	194.334	212.823	215.260	237.672
Sulawesi Tengah	189.653	203.237	235.512	246.392	273.624
Sulawesi Selatan	153.715	163.089	179.933	190.545	203.070
Sulawesi Tenggara	161.583	165.208	181.577	195.306	204.406
Gorontalo	162.189	171.371	187.215	203.907	221.457
Sulawesi Barat	163.224	171.356	186.041	198.792	213.403

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

Selama kurun 5 tahun (2009-2013) garis kemiskinan di Pulau Sulawesi pada terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan antar provinsi, maka kenaikan garis kemiskinan terbesar ada di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 83.971,- dari per kapita per bulan yaitu Rp. 189.653 di tahun 2009,- menjadi Rp. 273.624,- per kapita per bulan pada tahun 2013.

Selain peningkatan garis kemiskinan terbesar, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki garis kemiskinan tertinggi di Pulau Sulawesi pada periode 2009-2013. Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki garis kemiskinan terendah pada periode yang sama.

4.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Selama tahun 2009-2013 tampak bahwa secara umum jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi mengalami penurunan sebesar 455,56 ribu jiwa yaitu 2.490,10 ribu jiwa pada tahun 2009 menjadi 2.034,54 ribu jiwa pada tahun 2013. Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah memberikan sumbangan terbesar untuk penurunan tersebut yaitu masing-masing sebesar 37,3 persen dan 28,2 persen. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat memberikan sumbangan terkecil untuk penurunan tersebut yaitu hanya 1,6 persen.

Meskipun memberikan sumbangan terbesar untuk penurunan jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi, namun Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan sumbangan penurunan jumlah penduduk miskin terendah justru memiliki jumlah penduduk miskin terendah di Pulau Sulawesi.

Tabel 11
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2009 – 2013
(ribu jiwa)

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	219,60	206,70	195,62	190,21	185,52
Sulawesi Tengah	489,80	475,00	424,39	420,05	406,97
Sulawesi Selatan	963,60	913,40	836,56	831,48	793,67
Sulawesi Tenggara	434,30	400,70	332,18	319,71	305,83
Gorontalo	224,60	209,90	198,42	186,44	191,44
Sulawesi Barat	158,20	141,30	164,14	159,51	151,11
Sulawesi	2.490,10	2.347,00	2.151,31	2.107,39	2.034,54

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

Seiring dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi pada tahun 2009-2013, persentase penduduk miskin juga cenderung menurun. Akan tetapi, apabila dilihat dari tahun ke tahun Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Barat mengalami fluktuasi. Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan pada tahun 2011, sedangkan Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan pada tahun 2013.

Meskipun memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo memiliki penurunan persentase penduduk selama tahun 2009-2013 yaitu sebesar 7,50 persen poin. Tidak demikian halnya dengan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki persentase penduduk miskin terendah di Pulau Sulawesi, namun memiliki penurunan persentase penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 1,91 persen poin.

Tabel 12
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2009 – 2013

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	9,79	9,10	8,51	8,18	7,88
Sulawesi Tengah	18,98	18,07	15,83	15,40	14,67
Sulawesi Selatan	12,31	11,60	10,29	10,11	9,54
Sulawesi Tenggara	18,93	17,05	14,56	13,71	12,83
Gorontalo	25,01	23,19	18,75	17,33	17,51
Sulawesi Barat	15,29	13,58	13,89	13,24	12,30

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

4.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Seperti halnya dengan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi pun terjadi di Provinsi Gorontalo. Namun demikian, Provinsi Gorontalo mengalami penurunan tingkat kedalaman kemiskinan terbesar di Pulau Sulawesi selama tahun 2009-2013 yaitu sebesar 1,41 poin. Hal sebaliknya terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tingkat kedalaman kemiskinan terkecil, namun penurunan tingkat kedalaman kemiskinan terendah.

Tabel 13
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2009 – 2013

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	1,55	1,14	1,10	1,02	1,18
Sulawesi Tengah	4,09	3,09	2,76	2,56	3,09
Sulawesi Selatan	2,08	1,91	1,65	1,59	1,67
Sulawesi Tenggara	3,44	3,18	2,61	2,29	2,12
Gorontalo	4,59	4,14	3,72	2,92	3,18
Sulawesi Barat	2,47	1,55	2,32	1,81	1,89

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

Secara umum, selama tahun 2009-2013 tingkat kedalaman kemiskinan di Pulau Sulawesi cenderung menurun. Akan tetapi, bila dilihat dari tahun ke tahun hampir semua provinsi mengalami fluktuasi kecuali Provinsi Sulawesi Tenggara yang terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

4.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Selain menunjukkan penurunan tingkat kedalaman kemiskinan dari tahun ke tahun selama periode 2009-2013, Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengalami penurunan tingkat keparahan kemiskinan pada periode yang sama. Adapun provinsi lain di Pulau Sulawesi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun pada umumnya tingkat keparahan kemiskinan di Pulau Sulawesi cenderung menurun dari tahun 2009-2013.

Tabel 14
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi Tahun 2009 – 2013

Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	0,36	0,24	0,24	0,23	0,26
Sulawesi Tengah	1,37	0,80	0,75	0,66	1,04
Sulawesi Selatan	0,55	0,49	0,40	0,41	0,48
Sulawesi Tenggara	0,98	0,89	0,69	0,61	0,56
Gorontalo	1,27	1,00	1,00	0,71	0,90
Sulawesi Barat	0,60	0,35	0,61	0,41	0,52

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas 2009-2013

Bila dibandingkan antar provinsi di Pulau Sulawesi, pada tahun 2013 Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat keparahan kemiskinan tertinggi dengan nilai indeks lebih dari 1. Sedangkan provinsi lain di Pulau Sulawesi memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan kurang dari 1. Adapun untuk Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai indeks kedalaman terendah selama periode 2009-2013 dengan nilai tidak lebih dari 0,4.

BAB V

PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013

Besaran angka kemiskinan yang sajikan sebelum memberikan perkembangan kemiskinan yang terjadi dari waktu ke waktu maupun wilayah. Pada kondisi riil, gambaran rumah tangga miskin yang tercermin dari karakteristik rumah tangga miskin merupakan cerminan nyata dari kemiskinan yang dialami oleh rumah tangga. Karakteristik tersebut diantaranya meliputi pekerjaan, pendidikan dan huniannya.

5.1. Karakteristik Sosial Demografi

Perbincangan kemiskinan tidak cukup hanya pada angka absolut saja, akan tetapi juga perlu melihat karakteristik rumahtangga miskin itu sendiri. Karakteristik sosial demografi yang disajikan meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga dan rata-rata umur kepala rumah tangga

Rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak karena rumah tangga miskin diduga cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Dari tabel 15 terlihat bahwa di daerah perkotaan, pada tahun 2013 rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih sedikit dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Sementara di daerah perdesaan, rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin.

Isu kesetaraan gender semakin banyak diperbincangkan khususnya dengan adanya kemajuan pembangunan dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Peran wanita sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga bukanlah hal yang mudah. Di Provinsi Sulawesi Barat, sebesar 15,15 persen wanita sebagai kepala rumah tangga miskin dan 12,56 persen wanita sebagai kepala rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan kecenderungan wanita miskin untuk berperan ganda dalam rumah tangga sebagai

pencari nafkah dan ibu yang harus melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya. Kondisi ini merupakan cerminan secara umum di Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah perdesaan. Namun, berbeda halnya dengan daerah perkotaan yaitu wanita sebagai kepala rumah tangga tidak miskin lebih banyak dibanding rumah tangga miskin.

Tabel 15
Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga / Daerah	Miskin	Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	4,50	4,70
- Perdesaan (D)	6,18	4,31
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	6,00	4,40
2. Persentase wanita sebagai kepala rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	10,33	15,97
- Perdesaan (D)	15,74	11,49
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	15,15	12,56
3. Rata-rata umur kepala rumah tangga :		
- Perkotaan (K)	42,26	43,89
- Perdesaan (D)	47,26	44,04
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	46,71	44,01

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat produktifitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Rata-rata umur kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin lebih tinggi dari rumah tangga tidak miskin, yaitu sebesar 46,71 tahun pada rumah tangga miskin dan 44,01 tahun pada rumah tangga tidak miskin.

Tabel 16
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga di Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	89,67	10,33
- Perdesaan (D)	84,26	15,74
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	84,85	15,15
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	84,03	15,97
- Perdesaan (D)	88,51	11,49
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	87,44	12,56

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

5.2. Karakteristik Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan seseorang akan berkorelasi dengan taraf kehidupannya. Seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga pendapatan yang diperoleh akan lebih baik.

Kepala rumah tangga miskin yang buta huruf (tidak dapat membaca dan

menulis huruf latin dan atau huruf lainnya) lebih banyak bila dibandingkan kepala rumah tangga miskin yaitu sebesar 31,11 persen kepala rumah tangga miskin dan 11,98 persen kepala rumah tangga tidak miskin.

Tabel 17
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Huruf Latin	Huruf Latin dan Lainnya	Tidak Dapat Membaca dan Menulis
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	30,29	0,00	69,71
- Perdesaan (D)	69,29	4,41	26,39
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	64,96	3,93	31,11
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	82,94	12,38	4,69
- Perdesaan (D)	70,43	15,30	14,27
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	73,42	14,60	11,98

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Tabel 18 menunjukkan bahwa persentase kepala rumah tangga (KRT) yang tidak tamat SD dan tamat SD untuk rumah tangga miskin lebih tinggi bila dibanding rumah tangga tidak miskin. Sementara itu untuk pendidikan yang lebih tinggi yaitu SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, persentase kepala rumah tangga miskin dengan tingkat pendidikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa KRT yang tergolong miskin cenderung

berpendidikan rendah.

Tabel 18
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah Tangga Miskin :					
- Perkotaan (K)	77,54	0,34	22,1	0,00	0,00
- Perdesaan (D)	42,30	34,52	12,76	8,21	2,22
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	46,02	30,91	13,74	7,34	1,98
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :					
- Perkotaan (K)	24,11	19,51	19,41	25,96	11,02
- Perdesaan (D)	29,48	33,40	15,31	16,52	5,30
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	28,08	29,79	16,37	18,97	6,78

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

5.3. Karakteristik Ketenagakerjaan

Sumber penghasilan utama kepala rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan dan menggambarkan kondisi sosial-ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin diantaranya lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Stigma orang miskin seringkali identik

dengan bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan.

Tabel 19
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	Pertani an	Industri	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	10,06	71,95	0,00	18,00
- Perdesaan (D)	3,05	73,97	5,23	17,75
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	3,81	73,75	4,66	17,78
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	16,85	21,16	3,83	58,16
- Perdesaan (D)	8,84	62,03	5,16	23,97
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	10,76	52,25	4,84	32,15

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Sumber penghasilan utama rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat sebagian besar berasal dari sektor pertanian baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Provinsi Sulawesi Barat memiliki komoditi unggulan yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa dalam dan kopi.

Kepala rumah tangga miskin yang tidak bekerja lebih sedikit bila dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga miskin cenderung bekerja lebih banyak dengan jenis pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tabel 20
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Status Pekerjaan Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	1-2	3	4-5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah Tangga Miskin :					
- Perkotaan (K)	10,06	30,89	0,00	59,06	0,00
- Perdesaan (D)	3,05	69,85	0,00	27,10	0,00
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	3,81	65,61	0,00	30,58	0,00
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :					
- Perkotaan (K)	16,85	45,38	11,62	33,14	0,00
- Perdesaan (D)	8,84	65,04	2,04	22,44	1,65
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	10,76	60,34	2,66	25,00	1,25

Keterangan :

1. Berusaha sendiri
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
4. Buruh/karyawan/pegawai
5. Pekerja bebas
6. Pekerja keluarga atau tidak dibayar

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga diantaranya status pekerjaan yang disandang KRT.

Dari tabel 20 terlihat bahwa pada rumah tangga miskin tidak ada yang berstatus berusaha (berusaha dibantu buruh tetap/dibayar). Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin, status berusaha lebih banyak di daerah perkotaan. Hal ini mengindikasikan peluang kesempatan kerja atau membuka usaha di perkotaan lebih banyak, sehingga kesempatan berusaha akan semakin terbuka lebar. Sementara itu

untuk rumah tangga miskin, sebagian besar kepala rumah tangga berstatus berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yaitu 65,61 persen. Akan tetapi, pada rumah tangga miskin di daerah perkotaan lebih banyak yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas yaitu 59,06 persen.

5.4. Karakteristik Perumahan (Tempat Tinggal)

5.4.1. Luas Lantai

Indikator perumahan dapat menjadi salah satu determinan penting tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Luas rumah/hunian mencerminkan dugaan tingginya pendapatan ataupun keleluasaan pribadi yang diindikasikan dengan luas lantai rumah per kapita (m^2). Menurut Departemen Kesehatan (2002), salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapita minimal $8 m^2$.

Tabel 21
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Luas Lantai Per Kapita (m^2) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	< 8	8 -15	>15
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	59,66	40,34	0,00
- Perdesaan (D)	68,97	27,34	3,69
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	67,96	28,75	3,29
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	22,58	33,32	44,10
- Perdesaan (D)	21,72	37,94	40,35
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	21,93	36,82	41,26

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Tabel 21 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin memiliki luas lantai per kapita < 8 m² baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Sementara untuk luas lantai per kapita > 15 m² hanya sebagian kecil dimiliki oleh rumah tangga miskin bahkan di daerah perkotaan tidak ada rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita > 15 m². Berbeda halnya dengan rumah tangga tidak miskin dimana sebagian besar rumah tangga memiliki luas lantai > 15 m². Hal ini menggambarkan bahwa kondisi hunian rumah tangga miskin masih banyak rumah yang belum memenuhi standar kesehatan.

5.4.2. Jenis Lantai

Tabel 22
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga / Daerah	Bukan Tanah	Tanah
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	100,00	0,00
- Perdesaan (D)	98,31	1,69
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	98,50	1,50
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	99,52	0,48
- Perdesaan (D)	91,96	8,04
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	93,77	6,23

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Pola distribusi rumah tangga menurut jenis lantai terluas relatif sama baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin, sebagian besar rumah tangga tersebut

menggunakan lantai terluas bukan tanah. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jenis lantai terluas bukan tanah sebesar 98,50 persen sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 93,77.

Pola tersebut pun tergambar pada rumah tangga di daerah perkotaan maupun perdesaan. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan lantai bukan tanah sudah relatif sedikit. Meskipun demikian, pada rumah tangga tidak miskin di daerah perdesaan masih ada sebesar 8,04 persen rumah tangga yang menggunakan lantai tanah.

5.4.3. Jenis Atap

Tabel 23
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Beton/Sirap /Genteng	Seng/ Asbes	Ijuk/ Rumbia	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	0,00	22,31	77,69	0,00
- Perdesaan (D)	0,00	57,72	37,37	4,91
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	0,00	53,86	41,76	4,38
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	4,46	77,81	17,73	0,00
- Perdesaan (D)	2,23	75,90	20,65	1,22
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	2,76	76,36	19,95	0,93

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Pemilihan jenis atap dengan kualitas tertentu menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Pemakaian jenis atap beton,

genteng dan sirap oleh masyarakat Sulawesi Barat relatif sedikit bahkan untuk rumah tangga miskin tidak ada yang menggunakan jenis atap tersebut. Masyarakat lebih banyak menggunakan jenis atap seng/asbes baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin yaitu masing-masing sebesar 53,86 persen dan 76,36 persen. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena untuk mendapatkan genteng relatif sulit dan mahal, sehingga faktor ekonomis menjadi suatu pilihan.

Selain pemakaian jenis atap seng/asbes pada rumah tangga miskin, ijuk/rumbia juga merupakan jenis atap yang masih banyak digunakan oleh rumah tangga miskin yaitu sebesar 41,76. Bahkan rumah tangga miskin di daerah perkotaan sebesar 77,69 persen menggunakan jenis atap ijuk/rumbia.

5.4.4. Jenis Dinding

Tabel 24
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin :				
- Perkotaan (K)	30,89	18,00	41,06	10,06
- Perdesaan (D)	21,93	71,20	0,00	6,87
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	22,90	65,41	4,47	7,22
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :				
- Perkotaan (K)	52,20	28,27	6,12	13,41
- Perdesaan (D)	30,40	58,64	3,33	7,63
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	35,61	51,38	4,00	9,01

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Berdasarkan jenis dinding terluas, penggunaan tembok lebih besar pada

rumah tangga tidak miskin daripada rumah tangga miskin yaitu 22,90 persen pada rumah tangga miskin dan 35,61 persen pada rumah tangga tidak miskin. Sementara itu, pemilihan kayu sebagai jenis dinding terluas mendominasi baik pada rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin. Hal ini terkait dengan sosio-kultural masyarakat setempat yang masih cenderung menggunakan kayu sebagai jenis dinding terluas.

5.4.5. Sumber Penerangan

Tabel 25
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Non Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	98,06	0,00	1,94
- Perdesaan (D)	35,51	20,67	43,82
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	42,53	18,42	39,05
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	100,00	0,00	0,00
- Perdesaan (D)	46,94	30,18	22,87
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	59,17	22,96	17,87

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Pada rumah tangga miskin sebagian besar rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan baik listrik PLN maupun non PLN. Pada rumah tangga miskin di daerah perkotaan sebesar 98,06 persen menggunakan listrik PLN dan tidak

ada yang menggunakan listrik non PLN, sedangkan di daerah perkotaan 35,51 persen menggunakan listrik PLN dan 20,67 persen menggunakan listrik non PLN.

Pola distribusi pemakaian listrik pada rumah tangga miskin juga berlaku pada rumah tangga tidak miskin dimana sebagaimana besar rumah tangga menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN. Dari tabel 25 terlihat bahwa di daerah perkotaan seluruh rumah tangga tidak miskin menggunakan listrik PLN. Hal ini mengindikasikan bahwa di daerah perkotaan baik pada rumah tangga miskin maupun tidak miskin, pemakaian listrik menjadi pilihan utama untuk sumber penerangan rumah tangga.

Pemakaian non listrik pada rumah tangga miskin cukup banyak yaitu sebesar 39,05 persen dan didominasi oleh rumah tangga di daerah perdesaan. Akan tetapi, persentase tersebut lebih besar bila dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang hanya sebesar 17,87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian non listrik seperti petromak, lentera dan lainnya masih menjadi pilihan oleh rumah tangga miskin yang secara ekonomis lebih terjangkau.

5.4.6. Sumber Air Minum

Indikator perumahan lain yang dapat mencirikan sehat tidaknya suatu rumah adalah ketersediaan fasilitas air bersih sebagai sumber air minum untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Air bersih yang dimaksud adalah air yang bersumber dari air kemasan, air ledeng/PAM, sumur terlindung dan mata air terlindung.

Tabel 26
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Air Bersih*)	Lainnya**)
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin :		
- Perkotaan (K)	81,09	18,91
- Perdesaan (D)	45,94	54,06
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	49,77	50,23
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :		
- Perkotaan (K)	95,57	4,43
- Perdesaan (D)	64,05	35,95
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	71,59	28,41

Keterangan :

*) Air Bersih meliputi : air kemasan, air ledeng/PAM, sumur dan mata air terlindung.

**) Lainnya meliputi : sumur dan mata air tidak terlindung, air sungai, air hujan dan lain-lain.

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Penggunaan air bersih pada rumah tangga tidak miskin sebesar 71,59 persen lebih banyak bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang sebesar 49,77 persen. Baik pada rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin di daerah perkotaan lebih dari 80 persen rumah tangga menggunakan air bersih. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana air bersih di daerah perkotaan, selain faktor ekonomi yang kemungkinan mempengaruhi hal tersebut.

5.4.7. Fasilitas Jamban

Fasilitas lain yang harus dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam mendukung pola hidup sehat adalah ketersediaan jamban. Selain ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dapat dibedakan atas jamban sendiri, bersama dan umum/tidak ada.

Tabel 27
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Penggunaan Fasilitas Jamban
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Sendiri	Bersama	Umum/ Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	0,00	0,00	100,00
- Perdesaan (D)	25,62	3,34	71,04
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	22,83	2,98	74,19
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	65,90	10,48	23,62
- Perdesaan (D)	47,37	11,19	41,44
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	51,80	11,02	37,18

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

Pada rumah tangga miskin sebagian sebagian besar (74,19 persen) rumah tangga menggunakan fasilitas jamban umum atau tidak mempunyai jamban. Sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebagian besar (51,80 persen) rumah tangga memiliki jamban sendiri. Fenomena ini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga miskin belum

memiliki pemahaman kesehatan yang memadai dan tidak menutup kemungkinan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya.

5.4.8. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status pemilikan rumah dibedakan atas rumah sendiri, kontrak/sewa dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa dan lain-lain). Distribusi persentase pemilikan rumah relatif sama baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Sebagian besar rumah tangga menempati rumah sendiri yaitu 90,21 persen pada rumah tangga miskin dan 86,89 persen pada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga dengan status kepemilikan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa dan lain-lain) sebesar 9,79 persen pada rumah tangga miskin dan 8,77 pada rumah tangga tidak miskin. Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah dengan status kontrak/sewa merupakan yang paling sedikit dimana pada rumah tangga miskin tidak ada dan rumah tangga tidak miskin hanya 4,34 persen.

Pada rumah tangga miskin, tidak ada rumah tangga yang menempati rumah dengan status kontrak/sewa bahkan di daerah perkotaan 100 persen rumah merupakan milik sendiri. Rumah tangga miskin berusaha untuk memiliki rumah dengan fasilitas perumahan seadanya tanpa memperhatikan standar rumah sehat dan layak huni. Sementara itu, rumah tangga tidak miskin di daerah perkotaan yang menempati rumah dengan status kontrak/sewa di daerah perkotaan sebesar 12,12 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 1,89 persen.

Tabel 28
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal
di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Sendiri	Kontrak/ Sewa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin :			
- Perkotaan (K)	100,00	0,00	0,00
- Perdesaan (D)	89,01	0,00	10,99
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	90,21	0,00	9,79
2. Rumah Tangga Tidak Miskin :			
- Perkotaan (K)	81,47	12,12	6,41
- Perdesaan (D)	88,59	1,89	9,51
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	86,89	4,34	8,77

Sumber: BPS, Hasil Pengolahan Susenas Maret 2013

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**Jl. RE Martadinata No 10 Mamuju
Tlp. (0426) 2703340 fax. (0426) 22103**

**Email: sulbar@bps.go.id
Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>**